

**PENGARUH PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH  
TERHADAP IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH  
PADA MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MAMBA'UL ULUM  
DI KECAMATAN MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG**

Oleh  
**Elok Maria Ulfah**  
**(STIT Al-Ibrohimy Bangkalan)**

**Abstrak**

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: apakah peran kepemimpinan kepala sekolah (selaku *leader*, *administrator* dan *supervisor*) mempunyai pengaruh terhadap implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Mamba'ul Ulum di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang ?. Untuk mengungkap permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh timbal balik atau sebab akibat antara variabel bebas dan terikat, yaitu peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS. Kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan program *SPSS for Windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS pada MTs.S Mamba'ul Ulum di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Hal itu dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa dari hasil analisis didapatkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0.476, artinya nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam mempengaruhi hubungan dengan variabel terikat adalah sebesar 0.476 atau berarti bahwa ketelitian dari persamaan regresi linier berganda mampu menjelaskan hubungan variasi antara variabel peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *leader*, *administrator* dan *supervisor* terhadap implementasi MBS adalah sebesar 47.6 %. Sedangkan sisanya sebesar 52.4 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam peran kepemimpinan kepala sekolah. Sedangkan besar koefisien korelasi berganda ( $R$ ) =  $\sqrt{0.476} = 0.690$ , artinya nilai ini menunjukkan bahwa hubungan keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah kuat. Sementara itu, dari hasil pengujian hipotesis dengan Uji F dinyatakan bahwa simultan variabel *leader* ( $X_1$ ), *administrator* ( $X_2$ ), dan *supervisor* ( $X_3$ ), berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi MBS (Y) sebagai variabel terikat.

**Kata kunci:** Kepemimpinan, Kepala Sekolah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

## A. Pendahuluan

Kewenangan daerah kabupaten dan kota, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 *junto* Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan *Daerah*, mencakup semua bidang pemerintahan, yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi serta tenaga kerja<sup>1</sup>.

Salah satu aspek menarik dari dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 *junto* Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* adalah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola secara mandiri pendidikan di daerahnya. Dipandang menarik mengingat pendidikan merupakan salah satu wahana untuk mencetak generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa.

Menurut pengertiannya, pendidikan merupakan upaya memberikan pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju ke arah kedewasaan dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sementara itu, Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa akan datang<sup>2</sup>.

Berpijak pada pengertian pendidikan tersebut, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya pendidikan bukan hanya sekedar membuat peserta didik menjadi sopan, taat, jujur, hormat, setia, dan sebagainya. Tidak juga hanya bermaksud untuk membuat mereka (peserta didik) tahu ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mampu mengembangkannya. Melainkan lebih dari itu, pendidikan adalah

---

<sup>1</sup> Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 5.

<sup>2</sup> Pidarta, Made. 1997. *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. 10.

sebuah usaha untuk membantu peserta didik dengan penuh kesadaran, baik dengan alat atau tidak, dalam kewajiban mereka mengembangkan dan menumbuhkan diri untuk meningkatkan kemampuan serta peran dirinya sebagai individu, anggota masyarakat, dan umat Tuhan.

Pendidikan juga dimaksudkan untuk membuat peserta didik mau dan dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal ke arah yang positif<sup>3</sup>. Terkait erat dengan makna pendidikan tersebut, tersirat dengan jelas bahwa pendidikan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan pendidikan dapat dilihat pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), pelbagai peraturan pemerintah dan undang-undang pendidikan. Dalam GBHN Tahun 1993, dijelaskan bahwa kebijaksanaan pembangunan sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasmani-rohani (Pidarta, 1997: 11).

Sementara itu, pada arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pelayanan pendidikan nasional, pemerintah Indonesia juga senantiasa membuat kebijakan dan prioritas program sekaligus kegiatan yang memungkinkan setiap subjek didik atau anak-anak Indonesia untuk memiliki kesamaan, kesetaraan, kebebasan, kepastian, dan kesempatan mendapatkan, memilih, menikmati, dan menggunakan jenis pendidikan, fasilitas-fasilitas pendidikan, dan proses pendidikan yang manusiawi.

Sebagai contoh, kebijakan wajib belajar SMP/MTs 9 tahun dan akan dilanjutkan 12 tahun, perluasan akses memperoleh pendidikan, pemerataan memperoleh pendidikan bermutu, peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan, peningkatan manajemen pendidikan, dan peningkatan alokasi anggaran

---

<sup>3</sup> Pidarta, Made. 1997. *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. 10-11.

pendidikan<sup>4</sup>. Semua agenda pendidikan tersebut tidak akan tercapai secara maksimal jika hanya bertumpu pada pemerintah pusat (bersifat sentralistik). Sebaliknya, hasil maksimal akan lebih diperoleh jika kebijakan sektor pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang kemudian memberikan otonomisasi pada pihak sekolah.

Artinya, meski pemerintah daerah mempunyai hak dalam manajemen seluruh jenjang dan jenis pendidikan di daerahnya, bukan berarti pemerintah daerah mempunyai hak dalam perkembangan ilmu. Jadi, dengan adanya otonomi daerah dan otonomi pendidikan, maka akan terwujud otonomisasi pendidikan<sup>5</sup>. Tanpa otonomi, lembaga pendidikan dan pelatihan tidak berorientasi kepada kebutuhan lokal<sup>6</sup> (Tilaar, 2002: 36).

Kebijakan pemberian otonomi pada dunia pendidikan (otonomi sekolah) membawa implikasi yang cukup positif. Salah satu implikasi tersebut adalah munculnya konsep Manajemen Berbasis Sekolah (selanjutnya disingkat MBS). MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Disamping itu, kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan oleh sekolah. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri untuk menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggung jawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Rasiyo. 2005. *Berjuang Membangun Pendidikan Bangsa: Pijar-pijar Pemikiran dan Tindakan*. Malang : Pustaka Kayutangan. 136

<sup>5</sup> Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang : Indonesia Tera. 288.

<sup>6</sup> Ibid. 36

<sup>7</sup> Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 24.

Dalam konteks implementasi MBS, keberadaan, kedudukan, dan kepemimpinan kepala sekolah dipandang sangat strategis, sentral, dan vital. Suparno, dkk<sup>8</sup>. menyatakan bahwa kepala sekolah sangat strategis dan vital karena merupakan pemimpin tertinggi operasional sebuah sekolah, sehingga kepemimpinannya menentukan kadar kemajuan sekolah.

Disamping itu, kepemimpinan kepala sekolah mencerminkan tanggung jawab kepala sekolah untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, sehingga lahir etos kerja dan produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan. Fungsi kepemimpinan kepala sekolah ini amat penting sebab disamping berperan sebagai penggerak juga berperan untuk melakukan kontrol segala aktivitas guru, staf dan siswa dan sekaligus untuk meneliti persoalan-persoalan yang timbul di lingkungan sekolah<sup>9</sup>

Terkait erat dengan permasalahan diatas, penelitian ini sengaja dilakukan untuk mengungkap secara mendalam mengenai peran kepemimpinan kepala sekolah (selaku *leader*, *administrator* dan *supervisor*) mempunyai pengaruh terhadap implementasi MBS pada MTs.S Mamba'ul Ulum di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rumus regresi linier berganda untuk mengetahui adanya pengaruh timbal balik atau sebab akibat antara variabel bebas dan terikat, yaitu peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS pada MTs.S Mamba'ul Ulum di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Sementara itu, instrumen penelitian yang digunakan adalah berupa angket untuk mengetahui jawaban yang berkaitan dengan peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS pada MTs.S Mamba'ul Ulum di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Disamping itu, juga digunakan instrumen penelitian berupa uji validitas dan reliabilitas untuk menambah kehandalan instrumen penelitian.

---

<sup>8</sup> Rasiyo. 2005. *Berjuang Membangun Pendidikan Bangsa: Pijar-pijar Pemikiran dan Tindakan*. Malang : Pustaka Kayutangan. 339.

<sup>9</sup> Wahjosumidjo. 2007. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 90

Untuk memperoleh data di lapangan, prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Dimana kuesioner merupakan suatu metode untuk mendapatkan data, yang berisi sejumlah pernyataan tertulis yang dibagikan kepada subjek penelitian dengan tujuan untuk mengungkapkan kondisi dalam diri subjek yang ingin diketahui (Hadi, 2000: 25).

Data-data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara: 1) Editing, yaitu kegiatan memeriksa kebenaran data yang diperoleh dari responden untuk menjaga kemungkinan adanya kesalahan dalam memasukkan data. 2) Coding, yaitu memberi kode atau tanda tertentu dari data yang diperoleh. Sedangkan untuk mengetahui adanya pengaruh peran kepemimpinan kepala sekolah (selaku *leader*, *administrator*, dan *supervisor*) terhadap implementasi MBS pada MTs.S Mamba'ul Ulum di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, maka data yang telah terkumpul di analisis dengan menggunakan rumus persamaan regresi linier berganda.

### C. Konsepsi Kepemimpinan Kepala Sekolah

Rasiyo (2005: 341-342) menuturkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan, kesanggupan, daya, dan kiat kepala sekolah untuk menggerakkan, mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, memberi inspirasi dan teladan, mempersuasi, dan mengelola para guru, staf tata usaha, siswa, orang tua siswa, dan *stakeholder* pendidikan dalam usaha mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah, dalam hal ini adalah kemajuan sekolah atau peningkatan mutu pendidikan.

Pengertian tersebut diatas mengimplikasikan tiga hal pokok, yaitu: *pertama*, kepemimpinan kepala sekolah meliputi tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu kepala sekolah beserta segala ciri dan sosoknya, warga sekolah dan *stakeholder* pendidikan lain, dan konteks dimana kepala sekolah dan warga sekolah sebagai pengikut berinteraksi. *Kedua*, kepemimpinan kepala sekolah hanyalah wahana, sarana, dan/atau proses menggerakkan dan mempersuasi warga sekolah dan *stakeholder* pendidikan lain agar bersedia secara sukarela melakukan tindakan dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. *Ketiga*, kepemimpinan kepala sekolah diabdikan untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan, yaitu kemajuan sekolah khususnya proses peningkatan mutu pendidikan sekolah. Agar ketiga implikasi tersebut dapat

diwujudkan oleh kepala sekolah, maka kepala sekolah harus memiliki sejumlah kewenangan (otoritas) dan tanggung jawab.

Sementara itu, peran kepemimpinan kepala sekolah dapat diartikan sebagai kontribusi yang diberikan oleh seorang kepala sekolah kepada seluruh komponen yang terlibat dalam lembaga yang dipimpinnya, meliputi: guru, staf, siswa, maupun orang tua siswa. Peran dalam hal ini dapat diartikan sebagai sejumlah tanggung jawab atau tugas yang dibebankan dan harus dilaksanakan oleh seorang kepala sekolah<sup>10</sup>

Suparno, dkk (dalam Rasiyo, 2005: 339) menyatakan bahwa kepala sekolah sangat strategis dan vital karena merupakan pemimpin tertinggi operasional sebuah sekolah, sehingga kepemimpinannya menentukan kadar kemajuan sekolah. Disamping itu, kepemimpinan kepala sekolah mencerminkan tanggung jawab kepala sekolah untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, sehingga lahir etos kerja dan produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan<sup>11</sup>.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006: 65), terdapat tujuh peran utama kepala sekolah, yaitu: 1) Edukator. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. 2) Manajer.

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan, optimalisasi dan pengembangan sarana prasarana sekolah serta profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogianya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan

---

<sup>10</sup> Wahjosumidjo. 2007. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 154.

<sup>11</sup> Ibid. 90.

profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, seperti: MGMP/MGP tingkat sekolah, *in house training*, diskusi profesional dan sebagainya, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti: kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. 3) Administrator. Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan pembelajaran, kompetensi guru dan sarana prasarana pembelajaran, tidak terlepas dari faktor biaya. Oleh karena itu, kepala sekolah seyogianya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru serta optimalisasi sarana prasarana pembelajaran. 4) Supervisor.

Untuk mengetahui sejauhmana proses pembelajaran yang terjadi, kepala sekolah juga berperan untuk melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (Mulyasa, 2003: 154). 5) *Leader*. Dalam teori kepemimpinan, setidaknya terdapat dua gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia.

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan program sekolah, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin dalam sifat-sifat sebagai berikut: jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil, dan teladan (Mulyasa, 2003: 156). 6) Pencipta iklim kerja.

Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap aktifitas pembelajaran di sekolah lebih termotivasi antara murid, guru dan semua komponen yang ada di sekolah untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya. 7) *Wirausahawan*. Kepala sekolah seyogianya dapat menciptakan pembaharuan, keunggulan komparatif, serta memanfaatkan



berbagai peluang. Kepala sekolah dengan sikap kewirausahaan yang kuat, akan berani melakukan perubahan-perubahan yang inovatif di sekolahnya, termasuk perubahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya.

#### **D. Konsepsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

*School based management* yang telah di Indonesiakan menjadi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), para ahli pendidikan telah memberikan berbagai pengertian, seperti Etheridge yang mengatakan bahwa MBS adalah sebuah proses formal yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua siswa, siswa dan masyarakat yang berada dekat dengan sekolah dalam proses pengambilan berbagai keputusan (Rosyada, 2004: 267).

Sementara itu, Rosyada (2004: 267) sendiri lebih menjabarkan pengertian MBS pada upaya memberikan otonomi yang sangat luas pada sekolah untuk membuat perencanaan, *budgeting*, dan implementasi berbagai programnya dengan memberdayakan unsur-unsur yang terlibat di sekolah tersebut, yaitu: kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua siswa, siswa dan bahkan masyarakat yang mendukung pengembangan sekolah tersebut. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan serta pengembangan sekolah, titik sentral berada di sekolah itu sendiri dan semaksimal mungkin mengembangkan *networking horizontal* dengan *stakeholder* dan *school community* yang peduli terhadap pengembangan sekolahnya.

Menurut Batubara (2004: 90-91), terdapat beberapa indikator yang menjadi karakteristik dari MBS sekaligus merefleksikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, antara lain: 1) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. 2) Sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai. 3) Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat. 4) Adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya, termasuk siswa) untuk berprestasi. 5) Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK. 6) Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan dan/atau perbaikan mutu. 7) Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua siswa dan masyarakat lainnya.

Direktorat SLTP, Ditjen Dikdasmen Depdiknas<sup>12</sup> merumuskan bahwa tujuan diterapkannya MBS di Indonesia adalah untuk: 1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerja sama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam upaya mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. 3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah. 4) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Disamping karena keinginan untuk mencapai tujuan diatas, alasan penerapan MBS di Indonesia adalah:

- 1) Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih mempunyai inisiatif dan kreativitas dalam meningkatkan mutu sekolah.
- 2) Dengan pemberian fleksibilitas/keluwes-an-keluwes-an yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya, maka sekolah diharapkan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumber dayanya secara optimal dalam upaya meningkatkan mutu sekolah.
- 3) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya, sehingga personil sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
- 4) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan di dayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- 5) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah-lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
- 6) Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana di kontrol oleh masyarakat setempat.

---

<sup>12</sup> Hadiyanto. 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. 71.

- 7) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
- 8) Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan sekolah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
- 9) Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
- 10) Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat<sup>13</sup>.

Menurut Sutjipto<sup>14</sup>, beberapa implikasi positif yang bisa diperoleh dari keterlibatan kepemimpinan kepala sekolah dalam realisasi MBS, antara lain: *pertama*, memungkinkan personil yang kompeten di sekolah dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. *Kedua*, memberikan hak kepada masyarakat sekolah untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang penting. *Ketiga*, menggunakan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pertanggung jawabannya. *Keempat*, mengarahkan dengan tepat sumber daya untuk mencapai tujuan sekolah. *Kelima*, mendorong kreativitas untuk mendesain program pengembangan sekolah. *Keenam*, menyadarkan guru dan orang tua akan perlunya anggaran yang realistis dalam keterbatasan biaya program yang bersumber dari pemerintah. Dan *ketujuh*, meningkatkan semangat guru serta memantapkan kader pemimpin pendidikan pada semua tingkatan.

Dengan penerapan MBS yang bertumpu pada kepemimpinan kepala sekolah sebagai *decision maker*, utamanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi.

Menurut Rasiyo (2005: 300-301) implementasi MBS menuntut:

---

<sup>13</sup> Hadiyanto. 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. 71-72.

<sup>14</sup> Ibid. 68.

- 1) Ditempatkannya sekolah sebagai unit utama pencapaian mutu dan peningkatan mutu pendidikan pada satu sisi dan pada sisi lain ditempatkannya birokrasi pemerintah sebagai unit penunjang pencapaian mutu pendidikan.
- 2) Adanya otonomi dan otoritas sekolah yang besar atau tinggi, baik berupa kemandirian, keberdayaan, keleluasaan, kedaulatan, dan kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan mikro.
- 3) Adanya efektivitas, transparansi, akuntabilitas publik, kerja sama, baik berupa pelibatan masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan maupun pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat luas.
- 4) Adanya responsivitas dan responsibilitas sekolah terhadap perubahan-perubahan yang terjadi demi pencapaian mutu dan peningkatan mutu pendidikan.
- 5) Adanya tim kerja yang cerdas dan kompak yang dapat berkolaborasi dan bersinergi secara mantap.
- 6) Adanya pengambilan keputusan secara kolaboratif dan partisipatif oleh semua *stakeholders* terutama kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
- 7) Adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat luas yang optimal terhadap sekolah, mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian kebijakan dan program sekolah.
- 8) Adanya kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis, egaliter, partisipatif, inspiratif, dan mampu menggerakkan fungsi-fungsi manajemen sekolah.

Selain itu, menurut Rasiyo (2005: 302-303) sekolah yang bisa dikatakan berhasil mengimplementasikan MBS pada dasarnya merupakan sekolah yang mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik sekolah yang berhasil mengimplementasikan MBS antara lain:

- 1) Dari segi keluaran (*out put*), sekolah itu mempunyai prestasi tinggi, baik prestasi akademis maupun non-akademis, yang keduanya akan mempermantap *brand equity* atau *brand mindset* sekolah.
- 2) Dari segi proses, sekolah itu mempunyai efektivitas pembelajaran atau belajar mengajar yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat dan efektif, lingkungan belajar yang

aman-tertib-nyaman-segar-menggairahkan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan tenaga kependidikan yang tinggi, budaya mutu yang baik, tim kerja yang dinamis dan kompak, otoritas yang memadai dan fungsional, partisipasi warga sekolah dan masyarakat yang tinggi, kemauan dan kemampuan untuk berubah, sistem perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan, dan responsibilitas yang baik atas berbagai kebutuhan akan mutu pendidikan.

- 3) Dari segi masukan (*input*), sekolah itu memiliki kebijakan-tujuan-sasaran mutu yang jelas, sumber daya tersedia dan berfungsi secara optimal, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, harapan prestasi yang jelas dan tinggi, dan fokus utama pada siswa serta masukan manajemen yang memadai dan fungsional.

#### **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 24 orang responden untuk menguji item-item pernyataan, kuesioner di distribusikan kepada 100 orang responden dengan waktu pengisian yang telah ditentukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, kuesioner yang kembali berjumlah 90 responden atau 90 persen. Sedangkan 10 orang responden atau 10 persen tidak mengembalikan kuesioner dengan berbagai macam alasan, diantaranya kurang berkenan untuk menjawabnya, batas waktu liburan sekolah serta lupa untuk mengembalikan. Selanjutnya, dalam analisis ini akan dibahas pula mengenai karakteristik responden menurut jenis kelamin, status dalam masyarakat sekolah, dan usia.

#### **Karakteristik Responden**

- 1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang menjadi subyek dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1  
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	46	46
2.	Perempuan	54	54
Total		100	100 %

## 2) Karakteristik Responden Berdasarkan Status

Tabel. 2  
Karakteristik Responden Berdasarkan Status

No.	Status dalam Masyarakat Sekolah	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1.	Komite sekolah	4	4
2.	Guru dan karyawan	6	6
3.	Siswa dan siswi	45	45
4.	Wali murid	45	45
Total		100	100 %

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari komite sekolah sebanyak 4 orang dengan prosentase 4 persen. Guru dan karyawan sebanyak 6 orang dengan prosentase 6 persen. Siswa dan siswi sebanyak 45 orang dengan prosentase 45 persen, dan responden dari wali murid sebanyak 45 orang dengan prosentase 45 persen.

## 3) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3  
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	U s i a	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1.	12 – 17 tahun	45	45
2.	18 – 23 tahun	-	-
3.	24 – 29 tahun	10	10
4.	30 – 35 tahun	2	2
5.	36 – keatas	43	43
Total		100	100 %

Berdasarkan tabel diatas, responden dengan usia 12 – 17 tahun sebanyak 45 orang dengan prosentase 45 persen, sedangkan responden dengan usia antara 18 – 23 tahun tidak ada. Usia 24 – 29 tahun sebanyak 10 orang dengan prosentase 10 persen, responden usia 30 – 35 tahun 2 orang dengan prosentase 2 persen dan responden usia 36 – keatas sebanyak 43 orang dengan prosentase 43 persen.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum kuesioner disebar ke seluruh responden, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada 100 responden. Uji coba ini dilakukan untuk menguji tingkat validitas dan reliabilitas pernyataan yang diajukan dalam penelitian ini. Dipilih sejumlah 100 responden dengan alasan bahwa jumlah tersebut mewakili keseluruhan responden.

#### 1) Uji Validitas Variabel Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Selaku *Leader*

Suatu instrumen dikatakan valid jika koefisien korelasi antara skor item dengan skor totalnya lebih besar dari r-tabel. Sedangkan jika korelasi antara skor item dengan skor total kurang dari r-tabel, maka item dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Dalam penelitian ini, dengan  $df\ 100 - 2 = 98$ , di dapat r-tabel-nya sebesar 0,195 (Hadi, 1991: 20). Dari 22 butir soal peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *leader* yang diuji cobakan kepada 100 responden, kesemuanya dinyatakan sah untuk mengukur konstruk.

#### 2) Uji Validitas Variabel Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Selaku *Administrator*

Suatu instrumen dikatakan valid jika koefisien korelasi antara skor item dengan skor totalnya lebih besar dari r-tabel. Sedangkan jika korelasi antara skor item dengan skor total kurang dari r-tabel, maka item dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Dalam penelitian ini, dengan  $df\ 100 - 2 = 98$ , di dapat r-tabel-nya sebesar 0,195 (Hadi, 1991: 20). Dari 18 butir soal peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *administrator* yang diuji cobakan kepada 100 responden, kesemuanya dinyatakan sah untuk mengukur konstruk.

#### 3) Uji Validitas Variabel Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Selaku *Supervisor*

Suatu instrumen dikatakan valid jika koefisien korelasi antara skor item dengan skor totalnya lebih besar dari r-tabel. Sedangkan jika korelasi antara skor item dengan skor total kurang dari r-tabel, maka item dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Dalam penelitian ini, dengan  $df\ 100 - 2 = 98$ , di dapat r-tabel-nya sebesar 0,195 (Hadi, 1991: 20). Dari 10 butir soal peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *supervisor* yang diuji cobakan kepada 100 responden, kesemuanya dinyatakan sah untuk mengukur konstruk.

## 4) Uji Validitas Variabel Implementasi MBS

Suatu instrumen dikatakan valid jika koefisien korelasi antara skor item dengan skor totalnya lebih besar dari r-tabel. Sedangkan jika korelasi antara skor item dengan skor total kurang dari r-tabel, maka item dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Dalam penelitian ini, dengan  $df\ 100 - 2 = 98$ , di dapat r-tabel-nya sebesar 0,195 (Hadi, 1991: 20). Dari 50 butir soal variabel implementasi MBS yang diuji cobakan kepada 100 responden, kesemuanya dinyatakan sah untuk mengukur konstrak.

## 5) Uji Reliabilitas Variabel Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Variabel Implementasi MBS

Uji reliabilitas yang digunakan adalah *Alpha Cronbach*, dimana suatu instrumen dikatakan reliabel atau andal apabila memiliki koefisien keandalan atau reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih (Arikunto: 1998: 49). Dari hasil uji reliabilitas berdasarkan *Alpha Cronbach*, ditemukan bahwa butir soal variabel peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *leader*, *administrator* dan *supervisor* dengan  $r\ alpha > 0.6$ , maka dinyatakan reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**

## 1) Uji Asumsi Normalitas Sebaran

Hasil uji normalitas sebaran variabel Manajemen Berbasis Sekolah, dengan  $df$  sebesar 100, Kolmogorof Smirnov hitung sebesar 0.078 dan nilai probabilitas sebesar  $0,141 > 0,05$ .

## 2) Uji Asumsi Linieritas Hubungan

Tujuan dari uji asumsi linieritas hubungan ini adalah untuk mengetahui apakah suatu variabel independen mempunyai hubungan yang linier atau non linier dengan variabel dependennya. Variabel independen dikatakan mempunyai hubungan yang linier jika tingkat signifikansi linieritasnya kurang dari 0,1. Hasil pengujian linieritas variabel independen terhadap variabel dependennya adalah tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel independen kurang dari 0,1. Hal itu berarti bahwa hubungan antara kedua variabel independen tersebut, yaitu peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *leader*, *administrator* dan *supervisor* linier terhadap implementasi MBS.



## 3) Pengujian adanya Multikolinieritas

Untuk mengetahui adanya gejala multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat hasil nilai VIF dari variabel bebas. Jika hasil regresi yang dihasilkan menghasilkan nilai  $VIF < 10$ , maka hal ini menunjukkan tidak adanya gejala multikolinieritas dan sebaliknya jika nilai  $VIF > 10$ , maka regresi menunjukkan adanya gejala multikolinieritas. Dari hasil perhitungan nilai VIF dengan komputer, diperoleh hasil bahwa regresi tidak mengandung adanya gejala multikolinieritas yang tinggi.

## 4) Pengujian adanya Autokorelasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan metode Uji Durbin-Watson. Adapun pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a) Banyaknya sampel ( $N$ ) = 100
- b) Banyaknya variabel bebas ( $k$ ) = 3
- c) Taraf/tingkat signifikansi yang digunakan ( $\alpha$ ) = 0,05

Dari hasil Uji Durbin Watson diperoleh  $D_L = 1,10$  dan  $D_U = 1,54$  serta  $4 - D_L = 2,90$  dan  $4 - D_U = 2,45$ . Sedangkan nilai Durbin Watson dari perhitungan  $DW = 1.360$  dan nilai ini terletak pada daerah  $1,10 \leq DW < 1,54$  atau berada pada daerah tanpa kesimpulan/*inconclusive*, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi bebas dari gejala autokorelasi (korelasi serial).

## 5) Pengujian adanya Heterokedastisitas

Uji asumsi lain yang harus dimiliki oleh data adalah residual dalam data harus mempunyai variansi yang sama. Untuk menguji residual pada data yang memiliki variansi sama, penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* ini meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen yang digunakan dalam suatu model regresi. Jika variabel independen ternyata signifikan ( $\text{sig} < 0,05$ ) mempengaruhi absolut residual, ini berarti bahwa dalam data terdapat heteroskedastisitas.

Apabila ternyata tidak signifikan ( $\text{sig} > 0,05$ ), berarti bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Model yang baik adalah model yang mempunyai asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi. Berdasarkan hasil pengujian

heteroskedastisitas dengan metode *Glejser*, ditemukan bahwa regresi bebas dari heteroskedastisitas. Hal itu berarti bahwa varian dari variabel pengganggunya adalah tetap atau sama.

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas, yaitu *leader* ( $X_1$ ), *administrator* ( $X_2$ ), dan *supervisor* ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat yaitu implementasi MBS, digunakan analisis regresi linier berganda. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = 39.649 + 0.497 X_1 + 0.866 X_2 + 0.849 X_3$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

$b_0$  = konstanta = 39.649

Ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel pengganggu terhadap implementasi MBS. Artinya, apabila variabel bebas konstan atau sama dengan 0, maka implementasi MBS akan bernilai sebesar 39.649 unit.

**$b_1$  = Koefisien regresi untuk  $X_1$  = 0.497**

Ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *leader* ( $X_1$ ) terhadap implementasi MBS. Artinya, apabila variabel peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *leader* meningkat 1, maka implementasi MBS akan meningkat sebesar 0.497 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan.

**$b_2$  = Koefisien regresi untuk  $X_2$  = 0.866**

Ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *administrator* ( $X_2$ ) terhadap implementasi MBS. Artinya, apabila variabel peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *administrator* meningkat 1, maka implementasi MBS akan meningkat sebesar 0.866 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan.

**$b_3$  = Koefisien regresi untuk  $X_3$  = 0.849**

Ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *supervisor* ( $X_3$ ) terhadap implementasi MBS. Artinya, apabila variabel peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *supervisor* meningkat

1, maka implementasi MBS akan meningkat sebesar 0.849 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan.

### **Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi**

Nilai  $R^2$  (koefisien determinasi) = 0.476 menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam mempengaruhi hubungan dengan variabel terikat adalah sebesar 0.476. Ini berarti bahwa ketelitian dari persamaan regresi linier berganda mampu menjelaskan hubungan variasi antara variabel peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *leader*, *administrator* dan *supervisor* secara umum terhadap implementasi MBS adalah sebesar 47.6 %. Sedangkan sisanya sebesar 52.4 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Sedangkan besar koefisien korelasi berganda ( $R$ ) =  $\sqrt{0.476} = 0.690$  menunjukkan bahwa hubungan keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah kuat.

### **Pengujian Hipotesis**

#### 1) Uji Hipotesis dengan Uji F

Untuk menguji adanya pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat digunakan uji F dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a)  $H_0 : \beta_1; \beta_2; \beta_3 = 0$ , artinya secara simultan variabel *leader* ( $X_1$ ), *administrator* ( $X_2$ ), dan *supervisor* ( $X_3$ ), tidak berpengaruh terhadap variabel implementasi MBS ( $Y$ ).

$H_1 : \beta_1; \beta_2; \beta_3 \neq 0$ , artinya secara simultan variabel *leader* ( $X_1$ ), *administrator* ( $X_2$ ), dan *supervisor* ( $X_3$ ), berpengaruh terhadap variabel implementasi MBS ( $Y$ ).

b)  $\alpha = 0,05$  dengan df pembilang = 3

df penyebut =  $100 - 3 - 1 = 96$

diperoleh nilai  $F_{\text{tabel}} = 2,70$

$$c) F_{hitung} = \frac{\text{Kuadrat Tengah Regresi}}{\text{Kuadrat Tengah Residual}} = \frac{6344.200}{218.175} = 29.078492$$

d) Uji Hipotesis

Karena  $F_{hitung}$  (29.078492) >  $F_{tabel}$  (2.70), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti secara simultan variabel *leader* ( $X_1$ ), *administrator* ( $X_2$ ), dan *supervisor* ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap variabel implementasi MBS (Y) sebagai variabel terikat.

2) Uji Hipotesis Secara Parsial

Untuk menguji adanya pengaruh secara parsial antara variabel *leader* ( $X_1$ ) terhadap variabel implementasi MBS (Y) digunakan uji t dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a)  $H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya tidak ada pengaruh antara variabel *leader* ( $X_1$ ) dengan variabel implementasi MBS (Y)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ , artinya ada pengaruh antara variabel *leader* ( $X_1$ ) dengan variabel implementasi MBS (Y)

b)  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$  dengan  $df = 100 - 3 - 1 = 96$

$$c) t_{hitung} = \frac{\beta_1}{Se(\beta_1)} = \frac{0.497}{0.165} = 3.017$$

d)  $t_{tabel}(\alpha/2 = 0,025) = 1,98$

e) Pengujian hipotesis:

Dari perhitungan secara parsial diperoleh  $t_{hitung} = 3.017$ . Sedangkan  $t_{tabel} = 1,98$  pada  $df = 96$  dengan tingkat signifikansi sebesar 5 %. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga secara parsial variabel *leader* ( $X_1$ ) berpengaruh secara nyata dan berhubungan positif terhadap variabel implementasi MBS (Y).

Sedangkan untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial antara variabel *administrator* ( $X_2$ ) terhadap variabel implementasi MBS (Y) digunakan uji t dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a)  $H_0 : \beta_2 = 0$ , artinya tidak ada pengaruh antara variabel *administrator* ( $X_2$ ) terhadap variabel implementasi MBS (Y)

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ , ada pengaruh antara variabel *administrator* ( $X_2$ ) terhadap variabel implementasi MBS (Y)

b)  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$  dengan  $df = 100 - 3 - 1 = 96$

c)  $t_{hitung} = \frac{\beta_2}{Se(\beta_2)} = \frac{0.866}{0.247} = 3.508$

d)  $t_{tabel}(\alpha/2 = 0,025) = 1.98$

e) Pengujian hipotesis:

Dari perhitungan secara parsial diperoleh  $t_{hitung} = 3.508$ . Sedangkan  $t_{tabel} = 1.98$  pada  $df = 96$  dengan tingkat signifikansi sebesar 5 %. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga secara parsial variabel *administrator* ( $X_2$ ) berpengaruh secara nyata dan berhubungan positif terhadap variabel implementasi MBS (Y).

Sementara itu, untuk menguji adanya pengaruh secara parsial antara variabel *supervisor* ( $X_3$ ) terhadap variabel implementasi MBS (Y) digunakan uji t dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a)  $H_0 : \beta_3 = 0$ , artinya tidak ada pengaruh antara variabel *supervisor* ( $X_3$ ) terhadap variabel implementasi MBS (Y)

$H_1 : \beta_3 \neq 0$ , artinya ada pengaruh antara variabel *supervisor* ( $X_3$ ) terhadap variabel implementasi MBS (Y)

b)  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$  dengan  $df = 100 - 3 - 1 = 96$

c)  $t_{hitung} = \frac{\beta_3}{Se(\beta_3)} = \frac{0.849}{0.295} = 2.876$

d)  $t_{tabel}(\alpha/2 = 0,025) = 1.98$

e) Pengujian hipotesis:

Dari perhitungan secara parsial diperoleh  $t_{hitung} = 2.876$ . Sedangkan  $t_{tabel} = 1.98$  pada  $df = 96$  dengan tingkat signifikansi sebesar 5 %. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga secara parsial variabel *supervisor* ( $X_3$ ) berpengaruh secara nyata dan berhubungan positif terhadap variabel implementasi MBS (Y).

## F. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis data tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara peran kepemimpinan kepala sekolah (selaku *leader*, *administrator* dan *supervisor*) terhadap implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Mamba'ul Ulum di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Hal itu dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa dari hasil analisis didapatkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0.476, artinya nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam mempengaruhi hubungan dengan variabel terikat adalah sebesar 0.476 atau berarti bahwa ketelitian dari persamaan regresi linier berganda mampu menjelaskan hubungan variasi antara variabel peran kepemimpinan kepala sekolah selaku *leader*, *administrator* dan *supervisor* terhadap implementasi MBS adalah sebesar 47.6 %.

Sedangkan sisanya sebesar 52.4 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam peran kepemimpinan kepala sekolah (selaku *leader*, *administrator* dan *supervisor*). Sedangkan besar koefisien korelasi berganda ( $R$ ) =  $\sqrt{0.476} = 0.690$ , artinya nilai ini menunjukkan bahwa hubungan keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah kuat. Sementara itu, dari hasil pengujian hipotesis dengan Uji F dinyatakan bahwa simultan variabel *leader* ( $X_1$ ), *administrator* ( $X_2$ ), dan *supervisor* ( $X_3$ ), berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi MBS (Y) sebagai variabel terikat.

## G. Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Batubara, Abd. Muhyi. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Ciputat Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Administrasi Sekolah Menengah*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Kebijakan Pendidikan Nasional*. Jakarta : Ditjen Depdiknas.
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Analisis Butir untuk Instrumen Angket, Tes dan Skala Nilai dengan Basicnya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hadiyanto. 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nitisemito, Alex S. 1989. *Manajemen: Suatu Dasar dan Pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pidarta, Made. 1997. *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina Miftahul. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rasiyo. 2005. *Berjuang Membangun Pendidikan Bangsa: Pijar-pijar Pemikiran dan Tindakan*. Malang : Pustaka Kayutangan.
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : Kencana.
- Soetopo, Hendiyat dan Soemanto, Wasty. 1988. *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta : Bina Aksara.
- Subroto, B. Suryo. 1988. *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah*. Jakarta : Bina Aksara.

- Sudjana. 2003. *Metode Statistika*. Bandung : Tarsito.
- Sugiono. 1998. *Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Pokok-pokok Organisasi & Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang : Indonesia Tera.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahjosumidjo. 2007. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wuradji. 2009. *The Educational Leadership: Kepemimpinan Transformatif*. Yogyakarta : Gama Media.